

STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEREKONOMIAN PEDESAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA BERWAWASAN PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN DI KABUPATEN NGAWI

Suhardjito^{*}, Meiyana Hikmawati

Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Soerjo, Ngawi

Info Artikel

Keywords:

Strategy,
Development,
Agriculture, Rural,
Agricultural
Machinery

Kata kunci:

Strategi,
Pengembangan,
Pertanian, Pedesaan,
Alat Mesin Pertanian

Abstract

Agricultural and rural economic development strategies through business partnerships with an insight into the development of machine tools. The purpose of writing this acuentific work ia for (1) Discusses the rural economic profile as a basic for planning development programs, (2) Discusses strategies for rural development with an agribusines perspective, and (3) Formulate policies for the development of Machinery in a comprehensive and integrative manner. The process of economic development of a nation implicitly requires the tranformation of traditional agriculture into advanced or modern agriculture. It is in the tranformation process that patterns of participation play a role. Advanced agriculture is agriculture that has the ability to continually adapt to ever changing and demands. Agribusines partnership institusions that can eliminate these various failures are integrated agribusines business institusions in the form of integration between (farmer, trader, processor) and products qualityraw materialis, excellent post Harvest handlinh and guaranteed food safety). This model is supported by the institutional revitalization of farmer groups, agricultural extension, and partner companies.

Abstrak

Strategi Pembangunan Pertanian dan Perekonomian Pedesaan Melalui Kemitraan Usaha Berwawasan Pengembangan Alsintan. Tujuan penulisan Karya Ilmiah ini untuk (1) Membahas profil ekonomi pedesaan sebagai basis perencanaan program pengembangan, (2) Membahas strategi dasar pembangunan pedesaan berwawasan Alsintan, dan (3) Merumuskan kebijaksanaan pengembangan alsintan secara koprehensif dan integratif. Proses pembangunan (ekonomi) suatu bangsa secara implisit mensyaratkan adanya transformasi pertanian tradisional menjadi pertanian maju atau modern. Dalam proses transformasi itulah pola partisipasi memainkan peranannya. Pertanian maju adalah pertanian yang berkemampuan untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan tantangan dan permintaan pasar yang senantiasa berubah. Kelembagaan kemitraan usaha alsintan yang dapat mengeliminir berbagai kegagalan tersebut adalah kelembagaan usaha agribisnis terpadu, berupa keterpaduan antarpelaku (petani, pedagang, pengolah) dan produk (bahan baku berkualitas, penanganan pascapanen yang prima serta jaminan keamanan pangan). Model tersebut didukung oleh revitalisasi kelembagaan kelompok tani, penyuluhan pertanian, dan perusahaan mitra.

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian dalam tiga dasawarsa terakhir lebih difokuskan pada pengembangan komoditas primer dengan mengandalkan kelimpahan sumberdaya alam. Untuk beberapa komoditas telah terjadi pelandaian pencapaian produktivitas karena keterbatasan potensi teknologi. Dilain pihak juga terjadi variasi inefisiensi teknologi pada berbagai wilayah dengan karakteristik yang berbeda.

Pada kedua kasus ini peranan teknologi menjadi sangat penting, yaitu teknologi yang mendorong tingkat produktivitas lebih tinggi dan bersifat spesifik lokasi.

Pengembangan komoditas pertanian ke depan perlu didukung oleh sumberdaya kapital, teknologi maju, dan sumberdaya manusia terampil menggunakan alat mesin pertanian dan berkelanjutan. Pengembangan paradigma baru ini hendaknya dilaksanakan dalam konteks pembangunan wilayah, berbasis komunitas lokal dan sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui pendekatan ini diharapkan akan terjadi keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan karena adanya dukungan partisipasi masyarakat luas, terdapat sinergi antar subsistem mekanisasi pertanian, antar sektor pembangunan, dan antar wilayah desa-kota (agropolitan). Melalui model pengembangan agribisnis ini akan terjadi peningkatan daya saing, nilai tambah, nilai tukar dan kesejahteraan petani.

Usaha tani di Ngawi didominasi oleh usaha tani keluarga skala kecil yang sangat lemah dalam berbagai bidang, seperti keterbatasan dalam menguasai asset produktif, modal kerja, posisi tawar-menawar dan kekuatan politik ekonomi, sehingga tidak dapat berkembang mandiri secara dinamis. Petani kecil sangat tergantung pada golongan petani lahan luas atau pedagang untuk memperoleh asset produktif (lahan, peralatan), modal kerja dan perolehan sarana produksi. Demikian juga dalam penjualan hasil petani sangat tergantung pada pedagang hasil. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan petani melalui pengembangan kelompok tani dan melalui kemitraan usaha alat mesin pertanian konsolidatif sebagai langkah strategis.

Petani adalah pelaku utama yang harus diberdayakan. Tahap awal yang perlu ditempuh untuk memberdayakan petani adalah membentuk kelembagaan berupa kelompok tani yang merupakan organisasi kerja sama. Kerjasama sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi yang pada dasarnya sangat sulit bila dihadapi secara individu. Selama ini petani lemah dalam menentukan harga produksinya karena sulit mendapat akses informasi pasar. Dalam hal ini petani harus melakukan konsolidasi yang bersifat horizontal. Selanjutnya melalui penyuluhan (pendidikan dan latihan) yang berkelanjutan terhadap kelompok yang mendapat pembinaan tersebut diharapkan menghasilkan sumberdaya manusia petani yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha tani dengan menggunakan alat mesin pertanian.

Untuk dapat berusaha tani lebih teratur dan terarah maka kelembagaan kelompok tani perlu menjalin kerja sama dan kemitraan dengan pihak usahawan. Keterkaitan dan kerja sama kelembagaan kelompok tani dengan pihak swasta/usahawan dapat terjalin secara baik bila terdapat saling ketergantungan dan kerjasama yang bersifat simetri serta saling menguntungkan.

Peran pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program diharapkan dapat mendorong dan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menggairahkan petani/kelompok tani maupun pihak swasta/usahawan, sehingga agribisnis dapat berkembang. Dalam hal ini pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator, regulator, motivator yang harus menserasikan hubungan antar pelaku agribisnis tersebut, sehingga para pelaku dapat berinteraksi secara proporsional dan tidak terjadi eksploitasi yang bersifat kontradiktif. Para pelaku usaha bisa meraih keuntungan yang seimbang. Dengan terjadinya keterpaduan berbagai unsur tersebut (kelompok tani, swasta/usahawan dan pemerintah) diharapkan agribisnis yang bersifat konsolidatif vertikal atau kemitraan tersebut dapat berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngawi, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* (sengaja) dengan pertimbangan bahwa lokasi ini memiliki potensi berupa lahan yang luas dan masyarakatnya mayoritas bekerja di sektor pertanian dan sudah menggunakan Alat Mesin Pertanian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Hasan et al., (2022) merupakan metode penelitian yang fokus, pencarian datanya melalui interaksi dan komunikasi secara terbuka dengan responden. Informan kunci yang digunakan pada penelitian ini menggunakan informan yang meliputi kepala Desa Ngawi ketua kelompok tani Desa Ngawi ketua gapoktan Desa Ngawi, kepala BPP (Balai Penyuluh Pertanian), 1 orang staf dinas pertanian, dan 3 orang dosen Universitas Soerjo Ngawi yang pernah berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang ada di Kabupaten Ngawi melalui

kegiatan penelitian (Sholeh *et al.*, 2022). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, survei lapangan, dan penyebaran kuisioner kepada informan.

Tujuan pertama dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan faktor internal dan faktor eksternal yang dapat menjadi pendukung atau penghambat dalam pengembangan sektor Alsintan di Desa Ngawi. Tujuan kedua dianalisis dengan menggunakan metode IFAS, EFAS dan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis IFAS dan EFAS membutuhkan informasi tentang bobot dan rating. Penentuan bobot setiap faktor diberi skala 0,0 sampai 1 (tidak penting sampai sangat penting) berdasarkan tingkat kepentingan relatif setiap faktor terhadap perkembangan sektor Mekanisasi Pertanian. Total pembobotan tidak boleh melebihi dan EFAS juga memerlukan rating. Kriteria angka dalam penentuan rating meliputi: 4 = sangat penting, 3 = penting, 2 = tidak penting, 1 = sangat tidak penting (Bite, 2022). Tahapan yang dilakukan dalam analisis ini adalah (1) responden diminta untuk menentukan bobot pada masing-masing faktor internal dan faktor eksternal yang telah teridentifikasi sebelumnya, (2) responden diminta untuk menentukan rating dari masing-masing faktor, (3) peneliti menentukan skor dari masing-masing faktor dengan cara mengalikan bobot pada masing-masing faktor dengan rating yang telah ditetapkan, (4) peneliti menentukan strategi yang harus diprioritaskan dalam pengembangan sektor mekanisasi, dengan cara menentukan posisi ordinat dari Y (menunjukkan kekuatan dan kelemahan) dan X (menunjukkan peluang dan ancaman), dan (5) merekomendasikan strategi yang menjadi prioritas pengembangan.

HASIL PEMBAHASAN

Salah satu hambatan utama untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi adalah lemahnya “bangunan” kelembagaan kemitraan konsumen alsintan terutama yang dijalankan oleh dan di masyarakat pedesaan. Dewasa ini sebagian pelaku pengguna Alsintan adalah petani di pedesaan dan hampir semuanya merupakan kegiatan usaha tani yang dikelola dengan pola usaha keluarga. Kemitraan usaha yang menonjol di tingkat desa adalah kemitraan horizontal, antara lain berupa kerja sama kelompok tani, sedangkan hubungan buruh-majikan, atau bapak-anak angkat.

Peran kemitraan usaha adalah pada kemampuan kerja sama yang lebih teratur dan terarah, sehingga pengembangan sistem asosiasi pengguna alsintan mempunyai daya guna yang lebih tinggi dan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan pelaku-pelaku agribisnis di pedesaan. Dihasilkannya produk pertanian berdaya saing tinggi, dapat dipandang sebagai interaksi sinergis dari komponen budaya material, peran kewirausahaan dan kelembagaan (kemitraan yang terbangun dengan baik). Struktur organisasi ekonomi masyarakat pedesaan sangat rapuh dan hal itu tercermin dari posisi pelaku ekonomi pedesaan yang tidak “memiliki” kekuatan memadai untuk melakukan bargaining position dengan pelaku ekonomi di luar desa. Lemahnya bargaining position tersebut disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kelemahan dalam pengorganisasian kelompok tani, penguasaan permodalan usaha, interdependensi yang sangat timpang antar pelaku ekonomi pedesaan dengan luar pedesaan.

Pola keorganisasian kemitraan yang ada di Kab. Ngawi dewasa ini, yaitu program pemerintah (inti-plasma), tradisional (patron client) pasar (“rasional”) dan koperasi alsintan masih menempatkan petani pada posisi yang tereksplorasi secara kurang adil. Pola pemerintah menunjukkan terlalu dominannya intervensi pemerintah dan pada umumnya menempatkan plasma pada posisi yang lemah. Pola tradisional sulit menumbuhkan semangat dan kreativitas serta mengembangkan diri, sedangkan pola pasar menyebabkan besarnya ketergantungan petani terhadap usahawan dan dapat menimbulkan konglomerasi. Bagi pengembangan agribisnis “kecil” masalah yang sering dihadapi terutama adalah ketidakseimbangan rebut tawar (bargaining position) dan adanya intransparansi bisnis. Oleh sebab itu peran pemerintah selain sebagai regulator dan pemberi insentif, juga perlu diarahkan untuk membantu pengembangan kegiatan kemitraan usaha agribkoperasi alsintan.

Karakteristik usaha tani di Indonesia dicirikan oleh sifat usaha skala kecil dikelola secara independen dan menyebar dalam kawasan yang luas (dispersal). Konsekuensinya adalah volume produksi terbatas, kualitas produk dan waktu panen bervariasi serta biaya pengumpulan produk relatif besar sehingga kurang kondusif bagi pengembangan agroindustri dan sistem pemasaran yang efisien.

Dampak integratifnya adalah tingginya biaya pemasaran sehingga akan menekan pangsa harga yang diterima petani dan mengangkat tingkat harga yang dibayar konsumen. Akibatnya adalah permintaan dan penawaran produk usaha tani akan menurun, sehingga menghambat perkembangan pengguna alsintan.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka strategi kemitraan usaha yang tepat untuk mendorong mengembangkan agribisnis di pedesaan adalah kemitraan usaha melalui konsolidasi vertikal. Usaha tani skala kecil dikonsolidasikan oleh suatu usaha agroindustri atau pemasaran dalam suatu usaha kemitraan sehingga tercipta satu unit industri pertanian (agroindustri). Pola kemitraan haruslah didasarkan pada kesadaran semua pihak bahwa mereka saling membutuhkan dan hanya dapat tumbuh bersama sehingga harus bermitra dengan prinsip transparan, adil, patuh aturan kesepakatan dan terpercaya.

Pengembangan unit agroindustri merupakan strategi dasar pengembangan agribisnis di pedesaan. Pengembangan unit agroindustri merupakan strategi operasional yang tepat sebagai implementasi dari konsep pengembangan wilayah pedesaan yang tertata (agropolitan). Mengingat pasar tidak selamanya sempurna dan adanya senjang informasi, maka pembentukan agroindustri haruslah dipacu melalui peran aktif pemerintah yang bertindak sebagai inisiator gagasan, mediator, fasilitator, pelindung dan regulator yang jujur, adil dan bijaksana.

Kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Untuk menjalin kemitraan, petani perlu disiapkan dalam arti ditingkatkan kemampuannya baik dari aspek keorganisasian, manajemen, dan permodalannya supaya bisa bermitra dengan yang lebih kuat. Suatu usaha dapat berkembang dengan baik bila dapat diidentifikasi dengan baik berbagai faktor yang mempengaruhinya baik faktor internal (pendorong dan penghambat) dan eksternal (peluang dan tantangan). Pengembangan kelembagaan kemitrausahaan dapat dipandang sebagai komplemen dari konsolidasi segmen-segmen kegiatan pertanian. Pada kelembagaan kemitrausahaan, kegiatan pertanian selain bisa diarahkan untuk meningkatkan pencapaian efisiensi ekonomi, juga bisa untuk tujuan peningkatan pemerataan dan keadilan.

Dengan konsolidasi segmen-segmen kegiatan pertanian “usaha tani” dapat menjadi satu kesatuan dengan industri “pengolahan hasil”. Dengan konsolidatif ini, friksi antar kegiatan tersebut dapat ditekan sekecil mungkin. Gejala umum yang tidak sehat seperti harga bahan baku (hasil usaha tani petani) yang ditekan oleh pengusaha pengolah hasil pertanian tidak lagi dijumpai. Peningkatan efisiensi dapat dimulai dari konsolidasi lahan usaha tani, untuk dikelola secara kolektif. Beberapa manfaat adanya konsolidasi usaha tani ini antara lain:

1. Seluruh rangkaian kegiatan fisik dapat diselenggarakan di pedesaan sehingga pengembangan pertanian berimpit dengan pengembangan ekonomi pedesaan.
2. Teknologi dan modal untuk pengembangan pertanian langsung disalurkan ke pedesaan.
3. Sumberdaya pertanian di pedesaan, misalnya lahan bisa dikelola secara lebih efisien.
4. Mendorong perekonomian desa berkembang lebih pesat, sehingga dapat membendung mengalirnya tenaga-tenaga kerja muda yang potensial dari pedesaan ke kota.

Mengembangkan Agribisnis Konsolidatif

Ciri-ciri sebagian besar usaha tani Indonesia adalah (1) merupakan usaha keluarga skala kecil sehingga volume produksi per usaha tani sangat kecil, (2) usaha tani dikelola secara independen sehingga kualitas produk yang dihasilkan dan waktu panen bervariasi antar petani; (3) Usaha tani tersebar dalam kawasan luas (dispersal) sehingga biaya pengumpulan hasil produksi besar pula dan juga sistem pemasaran hasil tidak efisien; (4) volume kecil merupakan penghambat eksploitasi skala ekonomi; (5) kualitas yang beragam membuat ongkos standarisasi tinggi; dan (6) tiadanya kepastian informasi mengenai kualitas dan waktu panen menciptakan ongkos pencarian dan risiko kesalahan informasi.

Dengan demikian, strategi yang tepat untuk mendorong perkembangan agribisnis di pedesaan ialah agribisnis konsolidatif, usaha kecil dikonsolidasikan, sehingga sistem ekonomi

dualistik yang selama ini mendominasi usaha pertanian di Indonesia dapat dihapuskan. Indikator sehatnya organisasi masyarakat pertanian antara lain mencakup adanya konsolidasi dan integrasi antar cabang agribisnis pertanian, interdependensi antar pelaku agribisnis pertanian dan iklim usaha yang dibangun (praktek persaingan usaha yang sehat, pencegahan praktek monopoli, kemudahan usaha, kepastian hukum dan penyelenggaraan administrasi pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Pengembangan agribisnis konsolidatif merupakan konsolidasi secara vertikal dari sejak segmen kegiatan usaha tani, pengolahan hingga pemasaran. Dengan konsolidasi ini kegiatan pertanian “usaha tani” menjadi satu kesatuan dengan industri “pengolahan hasil”. Dengan konsolidatif ini, friksi antar segmen kegiatan agribisnis tersebut dapat ditekan sekecil mungkin. Gejala umum yang tidak sehat, seperti harga bahan baku (hasil usaha tani petani) ditekan oleh pengusaha pengolah hasil pertanian, tidak dijumpai lagi.

Strategi Dasar Pengembangan Alsintan

Bagian ini akan membahas beberapa hal sebagai berikut: 1) Pendekatan agropolitan dalam pengembangan alsintan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah; 2) Pendekatan pengembangan alsintan berbasis komunitas lokal dengan sasaran efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan program; 3) Pengembangan sistem dan usaha alsintan secara interatif dalam rangka efektivitas manajemen dan peningkatan daya saing komoditas pertanian; dan 4) Kebijakan strategis sebagai faktor pendukung pengembangan alsintan di tingkat nasional dan daerah.

Pendekatan Agropolitan Dalam Pengembangan Alsintan

Struktur perekonomian wilayah merupakan faktor dasar yang membedakan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi dan potensi suatu wilayah dari segi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan kelembagaan. Bagi pembangunan wilayah pedesaan dibutuhkan pusat pertumbuhan yang berfungsi sebagai pusat pasar, pelayanan dan pemukiman penduduk, dan sebagai unsur strategis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pedesaan (PSE, 2000).

Pentahapan langkah-langkah operasional yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan agribisnis berbasis komunitas lokal adalah pemilihan lokasi dan mitra pengembangan, pemahaman situasi perencanaan partisipatif, implementasi program yang diikuti oleh aktivitas pemantauan dan evaluasi partisipatif (PSE, 2000). Beberapa langkah operasional lainnya yang secara spesifik perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a) Pemilihan dan karakterisasi lokasi dengan sasaran untuk memperkuat, memperdalam dan memperluas kegiatan yang sudah ada; b) Identifikasi permasalahan dan kebutuhan secara intensif, dimana masyarakat didorong untuk memahami dan merumuskan pemecahan masalah yang mereka hadapi; dan c)

Pengkajian dan diseminasi teknologi secara partisipatif yang mengikuti alur kegiatan dalam kelompok kecil dan bersifat informal, pemecahan permasalahan secara kolektif, dan memperkuat hubungan secara horizontal

Restrukturisasi dan Konsolidasi Pengembangan Alsintan

Dalam rangka menempatkan sektor pertanian menjadi andalan pengembangan perekonomian rakyat dan pedesaan, maka perlu ditempuh langkah-langkah untuk merubah struktur kelompok pengguna alsintan yang ada. Dalam hal ini, paling tidak terdapat empat langkah penting yang perlu ditempuh (PSE, 1999), yaitu: a) Penghapusan struktur koperasi alsintan yang dualistik, b) Pengembangan alsintan spesifik lokasi, c) Pengembangan alsintan konsolidatif, dan d) Pengembangan kelembagaan kemitraan usaha.

Karakteristik usahatani rakyat dicirikan oleh sifat usaha kecil, pengelolaan independen, dan menyebar dalam kawasan yang luas (dispersal). Konsekwensinya adalah volume produksi terbatas, kualitas produk dan waktu panen bervariasi, dan biaya pengumpulan produk relatif besar sehingga kurang kondusif sebagai basis pengembangan agroindustri dan sistem pemasaran yang efisien. Dampak integratifnya adalah tingginya biaya pemasaran sehingga akan menekan pangsa harga yang diterima petani dan mengangkat tingkat harga yang dibayar konsumen. Akibatnya adalah permintaan dan penawaran produk usahatani akan menurun, sehingga menghambat perkembangan alsintan.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka strategi yang tepat untuk mendorong perkembangan pengguna alsintan di pedesaan adalah konsolidasi vertikal. Usaha tani skala kecil dikonsolidasikan oleh suatu usaha agroindustri atau pemasaran dalam suatu organisasi usaha kemitraan sehingga tercipta satu unit agribisnis industrial. Pola kemitraan haruslah didasarkan pada kesadaran semua pihak bahwa mereka saling membutuhkan dan hanya dapat tumbuh bersama sehingga harus bermitra dengan prinsip transparan, adil, patuh aturan kesepakatan, dan terpercaya. Pengembangan unit alsintan industrial merupakan strategi dasar pengembangan agribisnis di pedesaan. Pengembangan unit alsintan industrial merupakan strategi operasional yang tepat sebagai implementasi dari konsep agropolitan yang diuraikan sebelumnya. Mengingat pasar tidak sepenuhnya sempurna dan adanya senjang informasi, maka pembentukan agribisnis industrial haruslah dipacu melalui peran aktif pemerintah yang bertindak sebagai inisiator gagasan, mediator, fasilitator, pelindung dan regulator yang jujur, adil, dan bijaksana. Forum dialog antara pengusaha, kelompok tani, dan pemerintah dinilai sangat penting dalam mencapai keberhasilan program kemitraan agribisnis industrial di pedesaan.

Kebijakan Strategis Pengembangan Alsintan

Operasional paradigma pembangunan ekonomi pedesaan berlandaskan agribisnis (PEPEBA) membutuhkan dukungan paket kebijakan komprehensif dan terpadu yang meliputi enam program utama yaitu: a) Pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan, b) Pengembangan sistem inovasi pertanian, c) Pengembangan kelembagaan petani, d) Optimasi sumberdaya berkelanjutan, e) Pemacuan investasi, dan f) Kebijakan insentif.

Keenam program utama tersebut merupakan satu kesatuan yang saling komplementer dan sinergis. Dengan bidang cakupan yang demikian luas maka jelas kiranya bahwa penanggung jawab pelaksanaan program-program tersebut berada dalam departemen dan dinas pemerintahan yang berbeda. Oleh karena itu, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi merupakan kunci utama untuk keberhasilan operasionalisasi paket program tersebut. Di tingkat nasional, peranan Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) merupakan kunci bagi kelayakan operasional paradigma pembangunan ini. Sedangkan di tingkat Propinsi dan Kabupaten, institusi kunci ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran pembangunan yang sangat besar sehingga mesti mendapatkan dukungan politik dari DPR dan DPRD. Oleh karena itu, paradigma PEPEBA hanya dapat dilaksanakan apabila telah ada konsensus nasional.

Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Pedesaan

Adanya infrastruktur ekonomi yang memadai merupakan prakondisi bagi tumbuh-kembangnya kegiatan agribisnis dan perekonomian secara umum di pedesaan. Infrastruktur yang sesuai bagi usaha tani dengan alsintan dan perekonomian desa secara umum ialah: a) Sistem pengairan, b) Pasar komoditas pertanian, c) Jalan raya, d) Kelistrikan, e) Jaringan telekomunikasi. Infrastruktur tersebut merupakan barang publik (*public good*) atau semi publik (*semi public good*) sehingga pembangunannya harus diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat (swasta). Pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah yang paling strategis dalam operasionalisasi paradigma PEPEBA.

Walaupun dalam volume, kualitas dan waktu yang berbeda, setiap tanaman dan hewan mutlak membutuhkan air. Agroindustri juga membutuhkan air yang cukup. Bagi usaha pertanian, sistem irigasi berguna untuk (a) Meningkatkan produktivitas lahan, (b) Meningkatkan intensitas tanaman, (c) Meningkatkan potensi diversifikasi penggunaan lahan. Usaha peternakan membutuhkan air bersih dan sistem pengairan yang mengalir. Usaha perikanan membutuhkan air yang subur dan mengalir. Agroindustri membutuhkan air bersih dan sistem penyaluran limbah. Secara umum, sistem pengairan merupakan syarat esensial bagi pembangunan agribisnis di pedesaan.

Sumber air, seperti sungai dan danau, merupakan milik bersama masyarakat (*common property*). Pembangunan jaringan irigasi skala besar membutuhkan dana investasi yang sangat besar. Oleh karena itu, pembangunan sistem pengairan haruslah diselenggarakan oleh pemerintah atau oleh masyarakat lokal secara bersama-sama. Mengingat keterbatasan anggaran pembangunan

pemerintah maka alternatif lain yang dapat ditempuh ialah mendorong petani dan pengusaha membangun sumber pengairan sendiri seperti pompa air tanah, jaringan irigasi sederhana swakelola.

Pasar lokal komoditas pertanian juga sangat esensial bagi tumbuh-kembangnya agribisnis di pedesaan. Pembangunan pasar lokal sangat diperlukan untuk menjamin bahan produk yang dihasilkan petani dapat terjual dengan harga wajar. Pembangunan pasar lokal berfungsi menciptakan pasar komoditas pertanian yang efisien. Pasar lokal juga merupakan barang publik yang mesti dibangun dan dikelola pemerintah. Jalan raya diperlukan untuk membuka perekonomian desa sehingga tercipta perdagangan dengan perekonomian di luar desa. Sistem jalan raya yang efisien sangat diperlukan untuk meminimumkan biaya pemasaran. Sistem jalan raya yang efisien mutlak diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan agribisnis. Jalan raya merupakan barang publik yang mesti dibangun dan dipelihara oleh pemerintah.

Kelistrikan merupakan sumber tenaga dan penerangan yang sangat esensial untuk agroindustri serta berbagai alat dan mesin pertanian. Pembangunan kelistrikan pedesaan sangat diperlukan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan teknologi alsintan, perekonomian desa secara umum dan kenyamanan hidup penduduk pedesaan, kelestarian pedesaan dapat dibangun oleh pemerintah atau oleh perusahaan swasta. Namun demikian, mengingat peran strateginya, inisiatif dan tanggung jawab utama pembangunan kelistrikan swasta pedesaan perlu didorong dalam rangka mempercepat perluasan penyebaran kelistrikan di pedesaan. Jaringan telekomunikasi diperlukan untuk memperlancar lalu lintas informasi antara desa dan luar desa.

Jaringan telekomunikasi bermanfaat untuk mengurangi distorsi informasi pasar dan teknologi. Telekomunikasi yang cepat, tepat dan murah dapat mengurangi biaya transaksi. Dengan demikian, pembangunan jaringan telekomunikasi pedesaan esensial untuk menumbuh-kembangkan agribisnis dan perekonomian desa secara umum. Telekomunikasi mengandung skala ekonomi yang besar sehingga akan lebih efisien apabila dibangun oleh Badan Usaha milik Negara (BUMN). Namun demikian, investasi swasta pada usaha jasa telekomunikasi di pedesaan juga perlu dirangsang pemerintah sehingga perkembangannya lebih cepat dan pasarnya efisien.

Pengembangan Sistem Inovasi Pertanian

Organisasi petani yang perlu dikembangkan meliputi: a) Organisasi untuk mengatur sumberdaya milik bersama seperti: organisasi petani pengguna air, pemanfaatan hutan atau lahan alsintan, dan sebagainya, b) Organisasi bisnis kooperatif yang dapat berupa kegiatan kolektif (pembelian sarana produksi, kolektif, pengadaan modal kolektif dan pemasaran hasil kolektif), usaha bersama (kongsi) dan koperasi, c) Organisasi lobi politik-ekonomi dengan membentuk paguyuban petani.

Optimasi Sumberdaya Berkelanjutan

Usaha pertanian pada dasarnya berbasis pada sumberdaya alam yang meliputi tanah, air, iklim dan genetika. Apabila tidak dikelola dengan bijaksana, eksploitasi sumberdaya tersebut dapat merusak kapasitas pemilikannya sehingga potensi produksinya akan menurun dan basis produksi usaha pertanian akan menurun pula. Produktivitas usahapun akan menurun, yang berarti daya saingnya menurun pula. Dengan perkataan lain, usaha pertanian tidak dapat bertahan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya pertanian haruslah dilakukan secara optimal.

Optimasi sumberdaya berkelanjutan ialah pola pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan lima prinsip dasar: (a) pertumbuhan, (b) efisiensi, (c) stabilitas, (d) berkelanjutan, dan (e) keadilan yang merata. Dengan prinsip dasar ini maka teknologi alsintan akan dapat tumbuh-berkembang secara berkelanjutan. Optimasi sumberdaya berkelanjutan tak lain ialah pembangunan agribisnis berkelanjutan (sustainable agribusiness development).

Pemacuan Investasi

Kebijakan pemerintah yang dapat memacu investasi pada bidang teknologi alsintan di pedesaan diantaranya adalah: a) Penyediaan kredit investasi jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan penentuan alokasi kredit perbankan oleh Bank Indonesia, b) Penyediaan modal awal (seed capital). Pemerintah menyediakan modal awal dalam pembentukan agribisnis baru yang nantinya harus dikembalikan secara bertahap setelah perusahaan dapat tumbuh

mandiri, c) Pengembangan modal ventura. Pemerintah membentuk perusahaan modal ventura yang akan bertindak sebagai mitra usaha bagi perusahaan produsen alsintan di Ngawi, d) Pengembangan lembaga perkreditan pedesaan dan bank khusus agribisnis. Pengembangan lembaga perkreditan pedesaan dan bank khusus agribisnis sangat perlu sebagai sumber dana investasi dan modal kerja bagi agribisnis di pedesaan. Bank umum komersial yang sebagian besar berada di perkotaan kurang tertarik menyalurkan dana bagi pengembangan usaha alsintan di Kabupaten Ngawi.

Kebijakan Insentif

Pengusaha alsintan dan penduduk pedesaan secara umum memiliki kekuatan politik yang relatif rendah dibanding dengan pengusaha non-alsintan dan penduduk perkotaan. Kebijakan pemerintah seringkali cenderung bias menguntungkan pengusaha non-alsintan dan penduduk perkotaan. Kebijakan harga, perdagangan, fiskal dan moneter seringkali merugikan dan menghambat pertumbuhan teknologi alsintan, lebih-lebih yang berlokasi di pedesaan. Di sisi lain, pemerintah terhadap produk-produk agribisnis pada umumnya tidak elastis sehingga harganya cenderung menurun secara sekuler. Perpaduan antara dampak kebijakan pemerintah dan sifat intrinsik produk agribisnis menyebabkan nilai tukar (terms of trade) petani dan agribisnis secara umum cenderung menurun secara sekuler sehingga menghambat pertumbuhan pengguna alsintan di pedesaan.

KESIMPULAN

1. Pembangunan pertanian berwawasan teknologi alsintan yang berkelanjutan dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah perlu dihela oleh sumberdaya modal, SDM yang handal, dan pengembangan potensi teknologi secara dinamis. Dalam perumusan perencanaan dan implementasinya perlu dipahami profil dan dinamika ekonomi pedesaan, konsepsi dan strategi pengembangannya dan kebijaksanaan pendukung secara komprehensif dalam operasionalnya di lapangan.
2. Fokus pembangunan nasional pada sektor teknologi alsintan dinilai harus sejalan dengan struktur perekonomian saat ini dan diyakini akan mampu memacu pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan pembangunan nasional.
3. Daerah pedesaan dikembangkan berdasarkan pewilayahan komoditas unggulan utama yang menghasilkan bahan baku pengembangan agroindustri di daerah perkotaan. Satuan usaha pengembangan diorganisasikan ke dalam koperasi, perusahaan kecil dan menengah, dengan mempertimbangkan konsepsi pengembangan sebagai berikut: (a) Perkembangan kelembagaan usaha dilakukan melalui insentif dan tidak perlu dicampuri oleh pemerintah; (b) Selain berfungsi sebagai pusat pengembangan teknologi alsintan, kota juga berfungsi sebagai pusat pelayanan agribisnis yang kompetitif; (c) Lokasi dan sistem transportasi agroindustri dan pusat pelayanan harus memungkinkan para petani untuk bekerja sebagai pekerja paruh waktu; (d) Pusat agroindustri juga berfungsi sebagai pusat pengembangan sumberdaya manusia untuk teknologi yang berkaitan dengan komoditas utama, dan (e) Perkembangan institusional selanjutnya dapat berlangsung secara ilmiah, walaupun ada campur tangan pemerintah hanya dalam bentuk insentif dan disentif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana. 2000. Pengembangan Agribisnis Berbasis Komunitas Lokal. Makalah Rapat Kerja Badan Litbang Pertanian, 26-27 Oktober 2000, Jakarta. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor
- Adnyana, M.O. 2005. Lintasan dan Marka Jalan Menuju Ketahanan Pangan Terlanjutkan Badan Litbang Pertanian. 2000. Rumusan Sidang Kelompok Raker Badan Litbang Pertanian, 26-27 Oktober 2000. Jakarta.
- Clark, R.J. 1996. Coastal Zone Management Hand Book. CRC Lewis Publishers, Boca Raton, Florida. 694 pp.
- Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 10 November 2007.

- Etzioni, A. 1961. *A Competitive Analysis of Complex Organization: on Power, Involvement, and Their Correlates*. The Free Press of Glencoe, Inc., New York.
- Fauzi, A. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fauzi, A. 2007. *Economic of Nature's Non-Convexity Reorientasi. Pembangunan Ekonomi Sumberdaya Alam dan Implikasinya bagi Indonesia*. Orasi Ilmiah Guru Besar Ilmu Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan,
- Food and Agriculture Organization. 1989. *World. The State of Food and Agriculture*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
- Gunardi. 1980. *Kumpulan Bahan Bacaan Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Hadi, P.U., R. Sajuti, Saptana, Erwidodo, M. Rachmat, Kh.M. Noekman, dan A. Djauhari. 1994. *Analisa Kebijakan Pengembangan Agribisnis Perikanan dan Hortikultura: Model Pengembangan Agribisnis Mangga*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Hasan, M., Harahap, Tuti, K., Hasibuan, S., & Rodliyah, L. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Hasan (ed.); Tahta Medi). Tahta Media Group.
- Kasryno, F. 2000. *Menempatkan Pertanian Sebagai Basis Ekonomi Indonesia: Memantapkan Ketahanan Pangan dan Mengurangi Kemiskinan*. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Krisnamurthi, B. 2006. *Revitalisasi Pertanian: Sebuah konsekuensi sejarah dan tuntutan masa depan. Dalam Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Nasution, L.I. 1998. *Pendekatan Agropolitan dalam Rangka Penerepan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. PWD-PPS IPB.
- PSE. 2000. *Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berdasarkan Agribisnis*. Pusat Penelitian Sosial Ekonoomi Pertanian. Bogor.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian bekerja sama dengan BAPPENAS/ USAID/DAI. Bogor.
- Ravallion, M. and G. Datt. 1996. *How Important to India's Poor is The Sectoral Composition of Economic Growth/World Bank Economic Review* 10: 1-25.
- Rusastra, I.W. dan T. Sudaryanto. 1998. *dinamika Ekonomi Pedesaan dalam Perspektif Pembangunan Nasional*. Prosiding Dinamika Ekonomi Pedesaan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Sanim, B. 2006. *Analisis Ekonomi Lingkungan dan Audit Lingkungan*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Dosen Perguruan Tinggi Negeri Se-Jawa dan Bali dalam Bidang Audit Lingkungan, Bogor, 11–20 September 2006.
- Saptana dan T. Pranadji. 1994. *Dampak Kapitalisasi terhadap Sustainability Pertambakan Udang*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pengembangan Agribisnis Bidang Peternakan dan Perikanan pada Pelita VI dalam rangka Dies Natalis ke-30 Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Saptana, E.L. Hastuti, K.S. Indraningsih, Ashari, S. Friyatno, Sunarsih, dan V. Darwis. 2005. *Pengembangan Model Kelembagaan Kemitra-an Usaha yang Berdaya Saing di Kawasan Sentra Produksi Hortikultura*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Saptana. 2003. *Efisiensi dan Daya Saing Usaha Tani Beberapa Komoditas Pertanian di Lahan Sawah Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian bekerja sama dengan BAPPENAS/ USAID/DAI. Bogor.

- Saptana. 2003. Efisiensi dan Daya Saing Usaha Tani Beberapa Komoditas Pertanian di Lahan Sawah Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.
- Sayogyo. 1990. Manusia dan Produktivitas Pertanian Penopang Lepas Landas Kita. Prisma No.2 Tahun XIX. LP3ES, Jakarta.
- Sholeh, Mohammad, S., & Khoyimah. (2022). Pengambilan Keputusan Petani Dalam Sistem Penjualan Tanaman Jagung di Kecamatan Pakong, Pamekasan. *Agritech*, XXIV(2), 121–125. *Jurnal Sungkai*, 5, 32–52.
- Simatupang, P. 1995. Industrialisasi Pertanian sebagai Strategi Agribisnis dan Pembangunan Pertanian dalam Era Globalisasi. Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama Bidang Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Sudaryanto, T. dan P.U. Hadi. 1993. Konsepsi dan lingkup agribisnis. Makalah Seminar Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Sutopo, M.F. 1995. Serasah Ekonomi Sumber Daya Hutan Tropis Indonesia. Institute for Islamic Economics Studies, Yayasan Khoiru Ummah, Bogor.
- Syahyuti. 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan, Penjelasan tentang “Konsep, Istilah, Teori dan Indikator serta Variabel”. PT Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Turner, P.K., D. Pearce, and I. Bateman. 1993. *Environmental Economic: An elementary introduction*. John Hopkins University Press, Baltimore.
- Worldwatch Institute. 2005. *Vital Sign 2005*. NN Norton and Company, New York.
- Yusdja, Y., C. Saleh, M. Amir, dan Al Sri Bagyo. 1992. Studi Baseline Aspek Sosial Ekonomi Pengendalian Hama Terpadu. Kerja Sama Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Monograph Series No. 6. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.